

Sumber : Kompas	Hari/Tgl : Kamis, 26 Desember 2019	Hlm/Kol : VI / 4.
Subjek : Berpolitik		Bidang : Umum

Difabel dan Benar Berpolitik

Muhammad Khambali

Tahun ini peringatan Hari Disabilitas Internasional bertema "Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul".

Tema tersebut tidak jauh berbeda dari tahun lalu, "Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas", hanya mengganti kata "ramah" menjadi "unggul".

Dua tahun sebelumnya bertema "Menuju Masyarakat Inklusi, Tangguh, dan Berkelanjutan". Alih-alih memancing empati, kita jemu dan merasa tema-tema tersebut sekadar slogan dan bahasa spanduk.

Lebih dari itu, pemilihan tema-tema tersebut menjadi cerminan cara pandang terhadap isu disabilitas. Sejauh ini, istilah disabilitas dan difabel menggantikan "cacat" sebagai bentuk eufemisme atau penghalusan. Sebelumnya, kata "cacat" mengandaikan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik.

Kata cacat berasosiasi dengan tragedi, penyandangnyanya menderita penyakit atau mengalami musibah. Mereka butuh ditolong dan dikasihani. Sementara istilah disabilitas memakai model kacamata sosial, yang melihat penyandangnyanya sebagai korban dari konstruksi sosial yang menindas dan tidak setara (Barnes, 2003). Kacamata model sosial ini dianggap lebih tepat ketimbang kacamata medis dan nasib belaka.

Selain penggantian istilah, "inklusi" seakan menjadi kata wajib yang mesti dihadirkan dalam setiap tema peringatan Hari Disabilitas. Kampanye inklusivitas ini seiring kesadaran mengenai kesetaraan sehingga

difabel menjadi bagian dari keberagaman. Dalam pendidikan, kita mulai mendapati sekolah inklusi. Sekolah-sekolah reguler didukung untuk menerima murid difabel atau berkebutuhan khusus. Di level olahraga, tahun lalu kita menyelenggarakan Asian Para Games untuk atlet-atlet difabel. Belum lama ini, seleksi calon pegawai negeri sipil juga menyertakan formasi khusus untuk difabel.

Benar berpolitik

Semangat inklusivitas ini dapat kita lihat sebagai bentuk *political correctness* atau benar dalam berpolitik, terhadap isu disabilitas. Sikap mental yang tidak bias, tidak rasis, tidak benci, atau merendahkan (Utami, 2016).

Benar berpolitik ini bekerja di wilayah bahasa, laku, dan kebijakan. Upaya-upaya untuk benar berpolitik diharapkan dapat memutus lingkaran setan bernama diskriminasi, yang melekat—lebih tepatnya dilekatkan—kepada difabel.

Dalam praktik, tentu saja kita masih menjumpai persoalan-persoalan dalam nuansa kultural dan sikap mental yang masih menganggap difabel sebagai liyan—yang berbeda. Misalnya, kehadiran murid difabel di sekolah reguler ternyata memunculkan bentuk perundangan baru, seperti memanggil murid difabel sebagai "anak inklusi".

Keterlibatan murid difabel dalam pembelajaran juga masih dianggap sulit karena kurikulum pendidikan kita masih berbasis kompetensi dan standarisasi. Dalam kurikulum semacam itu, murid difabel akan tertidak-

mampuan (dibuat tidak mampu) dan terperangkap jebakan kurikulum. Mereka dianggap "tidak kompeten" dan "tidak mencapai standar" pembelajaran seperti murid lain.

Untuk dapat belajar di sekolah inklusi, murid difabel butuh pembaruan kurikulum yang mengakomodasi keberagaman kemampuan dan keunikan individu. Sebuah pembelajaran yang memakai pendekatan individual, bukan klasikal (penyeragaman).

Usaha untuk benar berpolitik juga butuh dibarengi ketersediaan akses atau aksesibilitas untuk memudahkan belajar, di antaranya, sekolah inklusi perlu menyediakan akses literasi berupa buku-buku braille atau buku dalam bentuk suara (*audio book*) bagi murid difabel yang tidak dapat melihat. Sementara murid difabel yang tidak dapat mendengar butuh informasi berbentuk gambar atau visualisasi, serta situasi sosial-kultural yang terbiasa dengan bahasa isyarat.

Dari segi arsitektur, sekolah perlu menyediakan jalan pemandu (*guiding block*) dan jalur *trailing* untuk murid difabel netra, juga *ramp* atau tangga landai untuk murid difabel fisik.

Aksesibilitas dan kesetaraan bagi kelompok difabel adalah menerima mereka jadi bagian dari keberagaman, bukan melebihi-lebihkan (Thohari, 2018). Bahkan, dalam kesadaran yang didorong oleh semangat benar berpolitik sekalipun, kita memang harus mengakui beberapa hal tanpa bermaksud melecehkan. Misalnya, difabel netra memang memiliki keterbatasan

Sambungan

Sumber: Kompas

Hari/Tgl: Kamis, 26 Desember 2019

Hlm/Kol: VI / 2.

penglihatan. Begitu pula difabel fisik memiliki keterbatasan dalam mobilitas. Itu adalah karakteristik faktual yang tidak perlu dimungkiri. Namun, ketidakmampuan mereka untuk belajar, untuk menikmati fasilitas publik, untuk bekerja dan berdaya, bukan lantaran dari keterbatasan fisik pada diri mereka, melainkan lingkungan sosial, kultural, dan politik yang tidak aksesibel.

Di sisi lain, benar berpolitik juga bukan dengan glorifikasi dan fabrikasi narasi. Misalnya, pengoreksian bahasa "cacat" dan "tuna" menjadi "anak luar biasa", lalu menjadi "anak berkebutuhan khusus" atau "difabel", tidak boleh berhenti pada eufemisme atau sekadar sopan santun berbahasa. Bukan juga demi kepatutan dan kecondongan belas kasihan. Alih-alih menyemai inklusivitas, jadinya malah eksklusivitas dalam kemasan baru.

Kesadaran kemanusiaan

Istilah baru, tetapi pengecapan terus terjadi, seperti ramai-ramai memanggil "anak inklusi" dan "anak khusus". Politik kesetaraan memang dapat bermula dari bahasa. Namun, pengoreksian bahasa atau istilah bagi difabel butuh diikuti kesadaran egalitarian dan kemanusiaan yang utuh. Tidak berongga dan masih menyimpan benih-benih rasial.

Di sinilah sikap rasial yang paling jahat justru bukan apa yang tampak di permukaan, melainkan yang terus disembunyikan dan dikomodifikasi. Kita masih senantiasa menjumpai narasi mengenai kelompok difabel sebagai obyek inspirasi dan tontonan heroisme. Narasi semacam itu justru memosisikan difabel tidak setara.

Slogan seperti disabilitas unggul, tangguh, atau inspiratif, jika dirunut justru berakar dari cara pandang yang menganggap difabel itu lemah dan tidak mampu. Dengan demikian, ketika difabel dapat melakukan hal yang biasa dilakukan nondifabel, mereka dianggap luar biasa. Pandangan semacam itu perlu diruntuhkan.

Jika tak juga berubah, kita perlu merenung lagi, ada apa dengan kemanusiaan kita.